

	News Title : Penerimaan Pajak Kripto 2022 Capai Rp 231,7 Miliar	
	Media Name : republika.co.id	Journalist : Dedy Darmawan Nasution
	Publish Date : 04 January 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pajak Kripto

Home > Ekonomi > Ekonomi

Penerimaan Pajak Kripto 2022 Capai Rp 231,7 Miliar

Rabu 04 Jan 2023 15:27 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/Red: Priksa Yolandha



Long crypto (Jurnalid)

Foto: jurnaid

Penerimaan pajak kripto belum terlalu besar karena pemungutan baru dimulai Mei 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak dari perdagangan fisik aset **kripto** di dalam negeri tercatat mencapai Rp 231,7 miliar. Jumlah pajak itu diakui belum besar lantaran pemungutan **pajak kripto** baru dimulai pada Mei 2022 lalu.



Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, menuturkan, total transaksi **aset kripto** periode Januari-November 2022 tembus mencapai Rp 296,66 triliun.

Baca Juga

Bukan Tak Mampu, Bappebti Ungkap Alasan Pengawasan Kripto Beralih ke OJK

Akui Belum Berhasil Bangun Bursa Kripto, Bappebti Target 2023 Tuntas

Serba-Serbi Digital Rupiah, Cara BI Lawan Kripto?

"Ini karena yang dikenakan pajak baru periode Mei sampai 14 Desember 2022. Sementara transaksi yang kita data itu Januari-November 2022," kata Didid dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/1/2023).

Pajak aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.



Aset kripto digolongkan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Bagi pedagang yang terdaftar di Bappebti dikenakan PPN 0,11 persen dan PPh 0,1 persen dari nilai transaksi. Sementara bagi pedagang yang tidak terdaftar di Bappebti dikenakan PPN 0,22 persen dan PPh 0,2 persen dari nilai transaksi.

Didid mengemukakan, Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia (Aspakrindo) sebelumnya telah menyampaikan aspirasi kepada Bappebti agar tidak dikenakan pajak terlebih dahulu. Namun pemerintah tidak setuju dan tetap harus menjadi ojek wajib pajak.

Setelah dikenakan pajak, Didid menyampaikan, Aspakrindo memohon agar adanya keringanan tarif pajak. Namun, ia menegaskan keputusan tarif pajak sepenuhnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

"Aspakrindo menganggap saat ini lagi kondisi winter crypto, tapi keputusan besar soal tarif ada di DJP. Kami fasilitasi pertemuan tapi keputusan di DJP," ujarnya.

Crypto Winter

Fenomena *Crypto Winter* diprediksi belum berakhir tahun ini. Meski demikian, pasar aset kripto untuk tahun 2023 kemungkinan tak lagi memburuk. Hanya masih membutuhkan waktu untuk *rebound* sepenuhnya seperti semula.

Didid mengatakan, kecenderungan pasar kripto Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan setelah naik luar biasa sejak 2021-2022 lalu. "Tahun 2023 *winter crypto* ini tidak selesai-selesai, artinya 2023 tampaknya walau tidak semakin memburuk tapi untuk *rebound* masih belum sepenuhnya," kata Didid dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/1/2023).

Winter Crypto yang dimulai sejak 2022 itu tercermin dari turunnya nilai transaksi. Data transaksi Januari-November mencatat baru mencapai Rp 296,6 triliun. Sementara nilai transaksi aset kripto tahun 2021 lalu tembus Rp 859,4 triliun, naik signifikan dari nilai 2020 yang hanya Rp 64,9 triliun.

Adapun, rata-rata transaksi kripto harian tahun 2022 hanya Rp 2,35 triliun, turun jauh dibandingkan 2021 lalu yang tembus hingga Rp 71,62 triliun per hari.



Meski demikian, Bappeti mencatat jumlah pelanggan aset kripto tetap mengalami kenaikan cukup signifikan. Hingga bulan Desember 2021, jumlah pelanggan kripto mencapai 11,2 juta orang. Memasuki 2022, hingga bulan November Bappebti mencatat jumlah pelanggan sudah mencapai 16,55 juta atau bertambah sekitar 5,2 juta.

Melihat data itu, Didid menilai meski transaksi mengalami penurunan, peminat kripto masih cukup banyak dan didominasi oleh kalangan milenial usia 18 tahun hingga 35 tahun. Ia menegaskan, dibutuhkan pengaturan kripto secara tepat agar pengguna kelas milenial dapat menjadi investor yang tak sekadar ikut-ikutan.

"Jadi, tahun 2023 ini masih kita hadapi tantangan yang luar biasa terkait aset kripto ini," kata Didid.